



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 006/12012009
HARI : SENIN
TANGGAL : 12 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	PM Kamboja Akan Hadiri KTT ASEAN di Thailand	3
	Iran Minta Muslim Bersatu Akhiri Pemusnahan Suku Bangsa di Gaza	3
	Majelis Taklim Indonesia Berdoa Khusus Untuk Palestina	3
	Obama Tangani Gaza di Hari Pertama	5
	AS Tolak Permintaan Israel	6
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Presiden Terima Perdana Menteri Suriah	7
	Rallies continue as Israel sustains assault	7
	I want to become state leader, Kalla says	8
	Suciwati Akan Temui Pelapor PBB	9
	Kepuasan Kepada Legislatif Pas-Pasan	9
	B. EKONOMI	
	Kelangkaan BBM pun bikin Presiden emosi (lagi)	10
	BPK Mengirim Surat ke Presiden Yudhoyono	11
	Govt to announce fuel prices cuts today	12
	16 Januari 2009, Fiskal Berlaku di Belawan	12

	C. SOSBUD		
		Standar Kelulusan UN Dinaikkan Jadi 5, 50	12
	D. HANKAM		
		Alutsista Pengadaan Kapal Selam Terbengkalai	13
	E. HUKUM		
		Polling: Jukung harus usut kasus Munir	14
		AGO files for an appeal over Muchdi's acquittal	14
		KPK Tegas soal Rekening Liar	15
		Pemberantasan Korupsi Keberhasilan KPK Bukan Prestasi Pemerintahan SBY	16
	F. OLAHRAGA		
		RI doubles double-up in Super Series	16
	G. LINGKUNGAN HIDUP		
		Terjangan Siklon Tropis Charlotte di Indonesia	17
	III. ARTIKEL		
		Abad 21, Abadnya Asia Oleh Bob Widayartono, MA	17
		Rethinking RI defense policy by Ali Abdullah Wibisono	19
		BHP Beda dengan BHMN oleh Sukemi	20
	IV. LAIN-LAIN		
		Feature: Mercury in gold mining: a Third World toxic threat by Michael Casey	21
		Wawancara Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda: Indonesia Konsisten Dukung Palestina	24
	V. EDITORIAL		
		Easing the traffic	26
		Rakyat belum Nikmati Turunnya Harga BBM	27
		Resolusi DK PBB 1860 Diabaikan	27

Jakarta, 12 Januari 2009
Sub Direktorat Berita

I. INTERNASIONAL :

1. PM Kamboja Akan Hadiri KTT ASEAN di Thailand

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, akan menghadiri satu KTT regional di Thailand bulan depan walaupun sebuah pernyataan sebelumnya menyatakan ia mungkin tidak akan hadir, kata seorang jurubicara pemerintah, Minggu (11/1).

Hu Sen pekan lalu mengatakan akan sulit bagi dirinya untuk menghadiri pertemuan ASEAN, yang belum lama ini penyelenggaraannya dipindahkan dari Bangkok ke kota pinggir pantai Hua Hin.

"Ia (Hun Sen) tidak mengatakan ia tidak akan ikut, tetapi ia menghadapi sedikit kesulitan. Akan tetapi, setelah dilakukan perundingan-perundingan, ia merasa yakin ia akan datang," kata juru bicara Khieu Kanharith.

KTT itu menurut rencana awal diselenggarakan di Bangkok, Desember 2008 tetapi kemudian dipindahkan ke kota Chiang Mai di utara negara itu, dan kemudian ditunda dan dipindahkan ke kota pantai Hua Hin dan akan diselenggarakan akhir Februari karena konflik politik melanda Thailand.

Thailand saat ini menjadi ketua bergilir ASEAN yang beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam itu. (Jurnal Nasional)

2. Iran Minta Muslim Bersatu Akhiri Pemusnahan Suku Bangsa di Gaza

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad, Minggu (11/1), meminta negara-negara Muslim bersatu untuk mengakhiri pemusnahan suku bangsa oleh Israel terhadap rakyat Jalur Gaza, kantor berita Aljazair APS melaporkan.

Setelah pembicaraan dengan timpalannya dari Aljazair Abdelaziz Bouteflika, Ahmadinejad mengatakan bahwa jika langkah mendesak dan global tidak diambil oleh negara-negara merdeka dan bebas untuk mengakhiri pemboman mematikan Israel di Jalur Gaza, kawasan itu, dunia Muslim dan kemanusiaan secara keseluruhan akan dihadapkan pada bencana kemanusiaan dalam skala bersejarah.

Ketika menyerukan sanksi politik dan ekonomi terkoordinasi terhadap Israel, Ahmadinejad mengatakan Iran akan memberikan setiap dukungan untuk melawan serangan Israel dan mencegah tahap pemusnahan baru suku bangsa dalam serangannya terhadap rakyat Palestina.

Ahmadinejad, yang memperingatkan bahwa dunia Muslim dan para pemimpinnya memiliki tanggung-jawab sejarah untuk bertindak, mengatakan masyarakat dan pemerintah Islam mampu menyuntikkan dinamika ke dalam intifada Palestina.

Ia menggunakan istilah bahasa Arab untuk aksi perlawanan yang digunakan untuk merujuk kepada dua aksi perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel yang dilancarkan pada 1987 dan 2000.

Israel telah mulai mengalirkan tentara cadangan ke Jalur Gaza, Ahad, ketika bentrokan hebat berkobar meskipun ada permintaan gencatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB.

Hampir 900 warga Palestina telah tewas sejak Israel melancarkan serangan besar-besarnya pada 27 Desember dalam menghadapi serangan roket dan mortir oleh gerilyawan Jalur Gaza. (Media Indonesia)

3. Majelis Taklim Indonesia Berdoa Khusus Untuk Palestina

Tiga majelis taklim Indonesia di Mesir rutin melaksanakan pengajian yang secara khusus memanjatkan doa, agar bangsa dan rakyat Palestina mendapat perlindungan Allah SWT, atas penderitaan yang kini diderita akibat dizalimi tentara Zionis Israel yang kembali melakukan agresi ke Jalur Gaza.

"Secara khusus dalam pengajian-pengajian terakhir ini kita membaca khusus surat ke-48 dalam Alquran yakni `Al-Fath` (Kemenangan) untuk rakyat Palestina yang sedang tertindas agar Allah SWT memberikan perlindungan bagi orang mukmin, sekaligus kemenangan atas penzaliman yang kini sedang berlangsung," kata Yasmin Fachir, pembina tiga majelis taklim kaum perempuan Indonesia di Mesir di Kairo, Sabtu (10/1) malam pukul 20.30 WIB waktu setempat atau Minggu (11/1) dinihari pukul 01.30 WIB.

Surat "Al-Fath" terdiri atas 29 ayat, yang secara ringkas berisi janji-janji Allah SWT bahwa umat Islam akan mendapat ampunan dan pahala besar, serta pertolongan dan kemenangan.

Tiga majelis taklim yang selama aktif melakukan kegiatan pengajian adalah "Muttaqin", "An-Nissa" dan "Al-Humaira", yang dalam kurun sebulan sekali melaksanakan pengajian gabungan, dan dipusatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo dan di Wisma Nusantara.

Menurut Yasmin Fachir --yang juga istri Dubes RI di Mesir A.M. Fachir--doa khusus dengan membaca surat "Al-Fath" itu adalah sumbangsih spiritual yang bisa dilakukan kaum ibu dan perempuan Indonesia di Mesir, selain bantuan kemanusiaan.

"Insya Allah, dengan doa yang kita panjatkan ini, bisa memberi kekuatan dan Allah SWT melindungi dan menyelamatkan rakyat Palestina dari kezaliman yang dilakukan Israel," katanya.

Pada bagian lain, ia menjelaskan bahwa majelis taklim "Muttaqin" adalah kelompok pengajian yang umumnya adalah dari ibu-ibu "home staff" KBRI Kairo yang berada di daerah Dokki, yang jaraknya sekira 15 menit berkendara dari Masjid Indonesia.

Sedangkan majelis taklim "An-Nissa" adalah kelompok pengajian ibu-ibu "home staff" yang berada di "Nasr City" dan dilakukan di Wisma Nusantara, yang berjarak satu jam perjalanan. Biasanya, saat pengajian juga hadir kalangan mahasiswi dari Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir maupun para tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di negara itu.

Majelis taklim ketiga yakni "Al-Humaira", adalah kelompok pengajian ibu-ibu di KBRI Kairo, dan kalangan istri ekspatriat, yakni perempuan Indonesia yang bersuamikan diplomat asing di Mesir.

"Malahan, dari kalangan istri ekspatriat ini selalu mengajak suami-suami mereka untuk mengikuti pengajian bersama," katanya.

Ketua Majelis Taklim "Muttaqin" Parsiti Johar menambahkan bahwa selain kegiatan pengajian, pertemuan-pertemuan yang dilakukan juga dipakai sebagai ajang silaturahmi bagi warga Indonesia untuk saling bertemu dan "curhat", karena kesempatan untuk bisa berkumpul tidak selalu ada.

"Bahkan tidak jarang juga waktu pengajian itu sebagai kesempatan untuk bertukar informasi diantara sesama warga Indonesia," katanya.

Donor darah

Masih terkait dengan solidaritas atas rakyat Palestina, pada hari Kamis (7/1) ratusan warga Indonesia yang ada di Kairo, Mesir, melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina yang kini mengalami pendudukan lagi oleh pasukan Israel, dengan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Mesir, yang dipusatkan di Wisma Nusantara di Kota Kairo.

Sekurangnya 170 warga Indonesia, mulai dari mahasiswa yang sedang studi di berbagai universitas, terutama Universitas Al-Azhar, keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan warga Indonesia lainnya, terus berdatangan untuk ikut mendonorkan darahnya.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama antara PPMI Mesir dengan KBRI setempat, serta dari Bulan Sabit Merah Mesir sebagai pihak yang akan menyalurkan donor darah dari masyarakat Indonesia itu.

Presiden PPMI Mesir Abdullah Yazid, mahasiswa Universitas Al-Azhar disela-sela kegiatan menjelaskan, apa yang dilakukan itu adalah bagian dari solidaritas kepada rakyat Palestina yang kini sedang menderita.

"Kami ikut berjuang sesuai kapasitas yang mampu dilaksanakan, dan sebelum aksi donor darah ini, sehari setelah invasi Israel ke Jalur Gaza pada 27 Desember 2008, secara kelembagaan telah mengeluarkan pernyataan mengutuk dan mengecam agresi itu," katanya.

Menurut dia, aksi donor darah itu, kemungkinan masih akan dilanjutkan, mengingat korban luka di Gaza juga kian bertambah, sehingga kebutuhan akan stok darah juga meningkat.

Sementara itu, Pelaksana Fungsi Politik KBRI Kairo Burhanuddin Badruzzaman mengatakan bahwa saat mulai terjadi agresi tanggal 27 Desember 2008 itu, dirinya ditunjuk Dubes RI untuk Mesir A.M. Fachir sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Gaza, yang tugasnya mengikuti perkembangan sekaligus mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.

"Aksi donor darah yang inisiatifnya dari PMI Mesir ini, adalah salah satu dari berbagai kegiatan yang dikoordinir oleh Satgas Gaza," katanya.

Melihat perkembangan di Gaza yang terus memburuk, sementara bantuan kemanusiaan mengalami hambatan untuk bisa masuk ke perbatasan, pihaknya memperkirakan persoalan Palestina ini masih akan berlangsung beberapa waktu.

Apresiasi positif

Atas aksi kemanusiaan itu, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Bulan Sabit Merah Mesir dr M Gaber menyatakan apresiasi positifnya dan menyebut bantuan kemanusiaan dari Indonesia itu sebagai "komprehensif".

"Kami menyambut baik bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang `komprehensif` untuk solidaritas Palestina, karena datang dari pemerintah, masyarakat dan organisasi swadaya masyarakat lainnya," katanya.

Sedangkan salah satu mahasiswa asal Padang, Sumatera Barat Melissa mengaku donor darah adalah salah satu sumbangan yang dapat ia berikan bersama para mahasiswa lainnya yang studi di Mesir untuk membantu warga Palestina.

"Kami hanya bisa membantu dengan cara (donor darah) ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat Palestina," katanya. (Jurnal Nasional)

4. Obama Tangani Gaza di Hari Pertama

Presiden AS terpilih Barack Obama, dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC News, menyatakan akan membentuk satu tim khusus yang bertugas mencari upaya-upaya damai di Timur Tengah segera setelah naik jabatan pada 20 Januari 2009.

"Apa yang sedang saya kerjakan sekarang adalah membentuk tim sehingga pada 20 Januari, dimulai dari hari pertama (saya memerintah), kami memiliki orang-orang yang paling mampu untuk menangani segera proses damai di Timur Tengah secara menyeluruh," katanya kepada ABC News.

Tim ini, demikian Obama, akan erat berhubungan dengan semua aktor (pihak bersengketa) di sana. Mereka akan bekerja untuk menciptakan satu pendekatan strategis yang menjamin bahwa baik Israel maupun Palestina terpenuhi aspirasi-aspirasinya.

Sebelum tanggal itu, dia akan membiarkan pemerintahan Presiden George W. Bush untuk menjalankan kebijakan luar negeri (AS), namun menegaskan itu demi kelanjutan proses damai di Timteng.

"Saya kira bahwa jika Anda lihat, tidak saja dari apa yang dilakukan pemerintahan Bush, namun juga dari apa yang sudah dilakukan pemerintahan (Bill) Clinton, Anda sedang menyaksikan garis-garis besar pendekatan sebuah pendekatan (kebijakan di Timteng)," kata Obama dalam wawancara yang sudah direkam Sabtu.

Obama mencatat pesan yang dia terima dari Wakil Presiden Dick Cheney minggu lalu bahwa timnya semestinya mempelajari dengan hati-hati pendekatan yang diambil pemerintahan yang sedang bertugas sebelum menyingkirkannya hanya demi satu tujuan politik.

"Saya kira itu saran yang sangat baik. Saya mesti mengetahui apa yang sedang terjadi sebelum kami memberi penilaian-penilaian dan bahwa kami tidak seharusnya membuat penilaian pada landasan informasi yang tidak lengkap atau retorika kampanye," kata sang presiden terpilih.

Di bawah pemerintahan Bush, Amerika Serikat telah dituduh oleh pihak Palestina telah memihak secara membabi buta pada Israel sehingga merugikan keseluruhan proses perdamaian.

Bulan Juli lalu, selama kunjungannya ke Israel, Obama berkata, "Jika seseorang menyerang roket-roketnya ke rumah saya di mana dua anak perempuan saya sedang lelap tertidur, saya akan berbuat apa saja untuk menghentikan serangan itu. Saya kira Israel akan berbuat hal serupa."

Saat ditanya ABC apakah dia akan mengulang retorika itu kini, Obama menjawab, "Saya kira prinsip dasar setiap negara adalah mereka mesti melindungi warganegaranya."

Israel untuk pertamakalinya Minggu mengungkapkan hasratnya untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai perang melawan Hamas di tengah pertempuran-pertempuran sengit yang telah menewaskan sekitar 900 orang di Jalur Gaza. (Kompas)

5. AS Tolak Permintaan Israel

Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush menolak permohonan Israel untuk membantu Tel Aviv menyerang fasilitas nuklir Iran.

Permintaan Israel itu terkait penghancuran kompleks nuklir Teheran dengan menggunakan bom khusus yang dapat meledakkan bunker dan izin melewati wilayah udara Irak guna mencapai kompleks nuklir utama Iran di Natanz. Namun, Washington menolak permintaan tersebut. Laporan tersebut diungkapkan harian terbesar di AS New York Times. Natanz merupakan satu-satunya pusat pengayaan uranium yang diketahui di Iran.

Kendati demikian, Gedung Putih mengatakan permintaan tersebut dapat meningkatkan kerja sama intelijen AS dan Israel pada misi terselubung AS untuk menyabotase program nuklir Iran. Program rahasia tersebut yang dimulai pada awal 2008 terdiri atas rencana masuk ke mata rantai pemasok bahan nuklir Irak di luar negeri serta menghancurkan sistem jaringan listrik dan jaringan lain.

Times juga mengutip wawancara dengan beberapa pejabat dan mantan pejabat Washington. Menurut mereka, program terselubung ini akan diserahkan ke presiden terpilih AS Barack Obama yang akan memutuskan apakah program itu dilanjutkan atau tidak. Bush menolak ide menyerang Iran secara terbuka berdasarkan usulan pejabat-pejabat senior seperti Menteri Pertahanan Robert Gates.

Gates mengatakan, penyerangan terbuka terbukti tidak efektif dan dapat memicu perang yang meluas di Timur Tengah. Sebenarnya permintaan Israel untuk terbang di teritori Irak untuk menyerang Iran merupakan buntut dari laporan badan intelijen AS pada 2007. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Teheran telah menonaktifkan pengembangan senjata nuklirnya empat tahun lebih awal. Dikabarkan, akibat laporan tersebut, Israel naik pitam.

Israel kemudian berusaha menyanggah laporan tersebut dan menyerahkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Iran masih mengembangkan senjata nuklirnya. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gordon Johndroe menolak memberikan komentar, Sabtu (10/1), waktu setempat. Sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional Bush, Stephen Hadley, mengatakan, Iran merupakan tantangan terbesar Obama di kawasan Timur Tengah.

Dia juga menuturkan, sanksi yang lebih berat dibutuhkan untuk mendesak Teheran mengurungkan ambisi pengembangan nuklirnya serta berhenti mendukung kelompok ekstremis. Hadley mengungkapkan, pemerintahan Bush telah berusaha untuk menopang dan mengumpulkan pengaruh sebagai warisan kepada pemerintahan Obama. Mengenai rencana serangan, pada awal 2008 sebenarnya Pemerintah Israel telah menunjukkan persiapan matang untuk menyerang Iran.

Berbagai pertemuan penting pun digelar. Bahkan, para pejabat Israel telah meminta bantuan AS agar menyediakan alat pengisi bahan bakar yang mampu mengisi ulang pesawat Israel agar bisa mencapai Iran dan kembali ke Israel. Kemudian, pada Juni 2008 Israel juga menggelar latihan perang di Laut Mediterania dalam rangka menyerang Iran. Bahkan, Laksamana Mulen pernah datang ke Israel pada Juli untuk menanyakan keinginan Israel.

Dalam pertemuan itu, pihak Israel yang diwakili Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi menawarkan program serangan udara ke Iran. Israel memandang bahwa serangan tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan Washington. Sementara itu, Obama mengatakan akan lebih

tangkas dalam menjalin hubungan Iran. "Nuklir Iran merupakan suatu tantangan terbesar dalam pemerintahannya," katanya. Diamengungkapkan, nuklir Iran dapat memicu konflik nuklir di Timur Tengah.

Obama berjanji akan membuat tekanan baru berdasarkan kehormatan dan tekanan baru berdasarkan perundingan, termasuk juga kejelasan mengenai keinginan di lini bawah. (Koran Sindo)

I I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Presiden Terima Perdana Menteri Suriah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (12/1) pagi di Istana Merdeka Jakarta, menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Suriah Muhammad Naji Otri. Hujan deras yang turun di sekitar Istana Merdeka membuat prosesi penerimaan tamu negara oleh Pasukan Pengamanan Presiden yang lazim dilakukan di halaman Istana dipindah ke teras atas Istana.

Seusai kumandang dua lagu kebangsaan masing-masing negara yang diiringi 21 dentuman meriam, Presiden memperkenalkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkop UKM Surya Dharma Ali, Mendag Mari Pangestu, dan Menhan Juwono Sudarsono.

Setelah itu, Presiden dan PM Otri beserta kedua delegasi melakukan pertemuan bilateral yang antara lain akan membicarakan kerja sama politik, ekonomi, serta persoalan di dunia internasional.

Neraca perdagangan Indonesia-Suriah sejak tahun 2003 hingga 2008 terus meningkat. Pada tahun 2003 total perdagangan kedua negara mencapai 47,08 juta dollar AS, 2004 (55,08 juta dollar AS), 2005 (60,48 juta dollar AS), 2006 (62,40 juta dollar AS), 2007 (79,97 juta dollar AS), dan 2008 sampai September (76,14 juta dollar AS). (Kompas)

2. Rallies continue as Israel sustains assault

In frustration and ire, Indonesians across the country rallied to show support for the Palestinian people as Israeli forces pushed deeper past Gaza City limits.

The main streets of major cities such as Jakarta, Makassar and Surabaya were glutted with demonstrations Sunday bringing out people of all political and religious backgrounds in a show of concern at Israel's unrelenting attack on Gaza which has persisted for more than 16-days.

The demonstration here various other rallies across the globe.

The Sunday rain did not prevent religious and political figures from gathering in at Menteng Park, Central Jakarta, in a show of solidarity which illustrated the cross-religious solidarity felt by all Indonesians.

Among those in attendance were Catholic philosopher Franz Magnis-Suseno, Muslim scholar Siti Musdah Mulia and senior journalist Goenawan Mohamad. Former president Abdurrahman Wahid failed to attend for health reasons.

In Makassar, South Sulawesi, thousands of people attended a gathering at the local mosque.

The event, organized by the Forum for Muslims (FUI), collected donations of more than Rp 160 million which will be used to send aid to Palestine. A similar rally was held by Nahdlatul Ulama in Surabaya, East Java, where hundreds gathered to express the solidarity and demand the United Nation bring Israeli Prime Minister Ehud Olmert to the international war crimes tribunal. The largest rally however was again coordinated by the Prosperous Justice Party (PKS) who in a show of political mobilization again deployed thousands on Jakarta's main streets.

"This is a serious human tragedy. We demand the UN Security Council put more pressure on Israel to immediately halt its strikes in Gaza," People's Consultative Assembly speaker Hidayat Nur Wahid said during the peaceful rally.

Separately, Muhammadiyah chairman Din Syamsuddin called on US president-elect Barack Obama take a stronger stance on the suffering of Palestinians. "The UN should impose sanctions on Israel," he said.

From Gaza City, Reuters reported Israeli forces edging into the Gaza Strip's most populous area on Sunday, killing at least 27 Palestinians in an offensive stepped up in defiance of international calls for a cease-fire.

Medical officials said about half of the Palestinian dead in the latest fighting in the Hamas-ruled territory were civilians.

"Israel is getting close to achieving the goals it set for itself," Israeli Prime Minister Ehud Olmert told his cabinet in Jerusalem, giving no timeframe for an end to the 16-day-long war.

"But patience, determination and effort are still needed to realise these goals in a manner that will change the security situation in the south," Olmert said, referring to Hamas rocket attacks that continued to hit Israeli towns.

Israel, the prime minister said, "must not miss out, at the last moment, on what has been achieved through an unprecedented national effort".

While Israeli commanders said whole Hamas battalions were being wiped out, Damascus-based Meshaal said Israeli forces had achieved nothing and pointed to the continued rocket fire.

Hamas leader Khaled Meshaal said his group would not consider a ceasefire until Israel ended its air, sea and ground assault and lifted a Gaza blockade. A Hamas delegation held talks in Cairo on an Egyptian truce plan.

Israel's deputy defence minister, Matan Vilnai, suggested time was running out for the Gaza campaign now that the UN Security Council had weighed in with a call to stop it.

"Therefore it seems -- I'm guessing -- that we are close to a cessation of the ground operations and a cessation of the overall operations," Vilnai said on Army Radio.

Israeli actions have drawn denunciations from the Red Cross, U.N. agencies and Arab and European governments.

The Palestinian death toll since Israel's offensive began on Dec. 17 stands at 869, many of them civilians, Gaza medical officials said. Thirteen Israelis -- three civilians hit by rocket fire and 10 soldiers -- have been killed, official Israeli figures showed.

New York-based Human Rights Watch has called on Israel to stop using white-phosphorus munitions in densely populated areas in the Gaza Strip, saying the chemical could severely burn people and set structures and fields on fire. (The Jakarta Post)

3. I want to become state leader, Kalla says

Refraining from expressing his readiness to challenge the incumbent Susilo Bambang Yudhoyono in July's presidential election, Vice President Jusuf Kalla said Friday he wants to become a "state leader".

Kalla made a similar statement during his recent meeting with outspoken Golkar Party lawmaker Yuddy Chrisnandi, who then translated the remark as the vice president's readiness to contest the presidential election.

But when asked to clarify Yuddy's statement, Kalla simply said "I am a state leader now". "As chairman of the Golkar Party, I am also a state leader. So, I am already a state leader. We all want to become a state leader," he told a weekly press briefing after Friday prayers.

When asked further whether he would join the July race as a presidential candidate, Kalla insisted, "The most important thing is I want to become a state leader".

Yudhoyono has announced his bid for a second five-year term, hinting at maintaining Kalla as his running mate in the upcoming presidential election.

In response, Kalla said in October that he would "accept any position as long as I can contribute to the development of the country."

But he added that his plans for the election were subject to the wishes of Golkar.

Senior members of the party, which won the 2004 general elections, have repeatedly asked Kalla to run for president, rather than for vice president.

Kalla declined the demand, saying Golkar would decide on this issue after the April legislative elections.

A series of surveys by pollsters showed Yudhoyono was still the most popular candidate in the upcoming presidential race, putting Kalla as an underdog. Kalla's poll rating was even behind Golkar cadre Sri Sultan Hamengkubowono X, who has declared his presidential bid.

There are rumors Golkar is planning on building a coalition with the Democratic Party, the United Development Party (PPP) and the National Awakening Party (PKB) and nominating the pair of Yudhoyono and Kalla in the upcoming election.

"It is just a proposal. The Golkar Party will decide the coalition only after the legislative elections," Kalla said Friday, responding to the rumors.

Political analysts attributed Yudhoyono's increasing popularity to his perceived success in running the country during his last four years in office.

Currently Yudhoyono's Democratic Party has been bombarding TV stations with ads promoting the government's success throughout its reign over the past four years.

The Golkar Party said it would similarly run a massive round of campaign advertising to prop up its popularity ahead of the legislative elections.

Kalla said all political parties could claim the success of the government in their political campaign ads because the achievements could only have been made through the hard work of the president, his deputy and all ministers.

"If an agreement between the 129 Golkar lawmakers in the House cannot be reached, how could the government have ever achieved anything?" he said. (The Jakarta Post)

4. Suciwati Akan Temui Pelapor PBB

Istri almarhum Munir, Suciwati, berencana menemui pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Pertemuan itu untuk membahas penanganan perkara hukum kasus kematian Munir.

"Dalam waktu dekat, kami akan menemui pelapor khusus PBB untuk HAM,"kata Suciwati ketika dihubungi SINDO di Jakarta kemarin. Menurutnya, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Hina Jilani, pelapor khusus PBB untuk pembela HAM pada 2007 ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Suciwati melanjutkan, saat itu Hila bertanya kepada Kontras tentang sejauh mana proses pengusutan kasus kematian Munir. Nah, pertemuan dengan pelapor khusus PBB nanti juga berkaitan dengan hal tersebut.

Menurutnya, saat ini pihaknya ingin meminta bukti Kejaksaan Agung yang akan mendaftarkan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dia juga berencana datang ke Kejagung guna menanyakan hal itu. Sebagaimana diketahui, PN Jakarta Selatan pada 31 Desember 2008 memvonis bebas terdakwa perkara pembunuhan Munir, mantan Deputi V Badan Intelijen Nasional (BIN) Muchdi Purwoprandjono.

Muchdi dinyatakan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kematian Munir. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) AbdulHakimRitongapadaJumat (9/1) mengaku sudah menerima berkas salinan putusan perkara pembunuhan Munir dari PN Jakarta Selatan. Dengan begitu, pengajuan kasasi atas putusan bebas Muchdi itu dapat dilakukan Kejagung secepatnya. Saat ini Kejagung sedang mengkaji salinan putusan itu. "Ya, kami sudah terima (salinan putusan),"katanya.

Menurut Ritonga, pihaknya akan memaparkan pertautan antara bukti satu dengan bukti lain dalam memori kasasi yang akan diajukan ke MA. Dia mengaku sudah dapat membuktikan bahwa putusan Muchdi bukan bersifat bebas murni. Namun, dia belum bersedia menjelaskannya. "Nanti saja di MA,"tandasnya. Diketahui sebelumnya, tim penasihat hukum Muchdi menolak sikap Kejagung yang akan mengajukan kasasi. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan bebas murni tidak dapat dikasasi.

Pengacara Muchdi pada Kamis (8/1) mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan bahwa rencana Kejagung mengajukan kasasi atas putusan bebas Muchdi dapat melanggar HAM. (Koran Sindo)

5. Kepuasan Kepada Legislatif Pas-Pasan

Hasil survei Indo Barometer terbaru menunjukkan, kepuasan publik terhadap para anggota legislatif hasil Pemilu 2004 di seluruh Indonesia hanya pas-pasan atau sekitar 50 persen.

Demikian salah satu kesimpulan hasil survei itu yang dipaparkan langsung Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodary, di Jakarta, Minggu.

Pemaparan hasil survei itu, diikuti dengan diskusi tentang "Pengetahuan dan Harapan Masyarakat terhadap Pemilu 2009", yang menghadirkan pula Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hafiz Anshari, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), Bambang Eka, dan Direktur CETRO, N Hadar Gumay.

Dari data yang diungkapkan Indo Barometer selengkapnya, ternyata hanya 50,8 persen responden pemilih menyatakan sangat dan cukup puas terhadap anggota DPR RI hasil Pemilu 2004, 41,3 persen tidak atau kurang puas, sementara 7,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Kondisi tidak jauh berbeda mengenai kepuasan publik atas anggota DPRD Provinsi maupun Kota. Khusus untuk DPRD Provinsi, 50,7 persen responden menyatakan sangat dan cukup puas, 40,3 persen kurang atau tidak puas, lalu sembilan persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota, 54,8 persen sangat atau cukup puas, 35,8 persen kurang atau tidak puas, dan 9,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Waktu pengumpulan data antara tanggal 16 hingga 26 Desember 2008, dan survei ini dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1200 orang ('margin of error') sebesar tiga persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," jelasnya.

Satu hal lagi, menurut M Qodary, responden dipilih dengan metode 'multistage random sampling' untuk menghasilkan responden yang mewakili populasi publik dewasa Indonesia.

Golput Administratif

Sementara itu, ketika para responden itu ditanya tentang apakah dirinya sudah tahu telah terdaftar atau belum pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 nanti, demikian M Qodary, muncul jawaban yang mengkhawatirkan.

"Mengapa, hanya 67,2 persen yang merasa yakin bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai pemilu pada Pemilihan Umum (Pemilu) nanti. Ini terus terang saya katakan sebagai angka yang mengkhawatirkan, karena mengindikasikan potensi 'golput administratif' terbilang besar," ungkapnya.

Mengenai jawaban yang menyatakan dirinya yakin tidak terdaftar, menurutnya, ada 18,3 persen, sedang tidak tahu atau tidak menjawab 14,5 persen.

Karena itu, M Qodary dkk meminta pihak Penyelenggara Pemilu agar memperhatikan secara serius masalah ini, guna menciptakan keinginan suatu Pemilu berkualitas. (Republika)

B. EKONOMI

:

1. Kelangkaan BBM pun bikin Presiden emosi (lagi)

2009 baru bergulir empat hari, Presiden sudah mendapat kado berita tak sedap. Belum dua pekan 'berita baik' penurunan harga premium dan solar dilansir, BBM justru hilang dari peredaran. Bukan cuma di pelosok, melainkan juga di banyak SPBU di Ibu Kota.

Tak mau menunggu lama-lama, pada kesempatan pertama tampil di forum resmi, yaitu se usai meresmikan pembukaan transaksi perdagangan di BEI, awal pekan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka langsung memarahi jajaran Pertamina meski direksi BUMN itu tak terlihat hadir di acara tersebut.

"Saya tidak happy kemarin ketika mengikuti media massa ada keterlambatan [pasokan] bahan bakar," ujarinya dalam nada berat.

Menurut SBY, pernyataan jajaran Pertamina yang beralasan kelangkaan BBM akibat hari libur atau karena mengenalkan sistem baru sebagai hal yang tidak dapat ditoleransi. Seharusnya tidak ada hari libur untuk melayani rakyat, lanjutnya.

"Tidak ada excuse seperti itu, lantas lalai, lantas tidak berkomunikasi dengan rakyat, lantas tidak responsif. Negara tidak boleh tidur untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk melayani rakyat."

Presiden agaknya tidak mau ambil risiko dengan isu BBM, apalagi pemilu sudah tinggal menghitung hari.

Pada kesempatan itu Wapres JK lalu meminta agar Pertamina meningkatkan stok BBM-nya.

Apa komentar kubu oposisi? Politisi PDI Perjuangan Arya Bima melihat kemarahan Presiden secara terbuka kepada direksi Pertamina merupakan bagian dari politik pencitraan.

"Saya melihatnya itu sebagai apologi saja. BBM langka bukan baru kemarin saja. Gas yang jadi program konversi energi pemerintah juga langka," kata Arya Bima.

Dia menuding peristiwa kelangkaan BBM tersebut sebagai bagian dari lemahnya manajemen pemerintahan SBY.

Pergantian direksi?

Kemarahan orang nomor satu di Tanah Air itu pada akhirnya membuat publik berspekulasi akan adanya pergantian personel di jajaran direksi PT Pertamina. Dirut PT Pertamina Ari H. Soemarno sepekan ini seakan gerah 'dikejar-kejar' wartawan untuk mengonfirmasikan pergantian dirinya sebagai dirut BUMN energi ini.

Dengan tegas dan jauh dari senyum, Ari menyatakan dirinya tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Dirut PT Pertamina. "Kalau diberhentikan pemegang saham saya siap, tapi saya tidak berniat mengundurkan diri dari jabatan saya."

Isu pergantian jajaran direksi PT Pertamina ini kembali mengemuka sehari sebelum Jenderal Pol (Pur) Sutanto dilantik menjadi Komisaris Utama BUMN energi pada 8 Januari.

Pelantikan sang Jenderal bahkan diwarnai kasak-kusuk bahwa jajaran direksi akan menyusul diganti karena dianggap gagal dalam menjaga distribusi BBM dalam negeri.

Sutanto pun tak luput dari kejaran wartawan yang salah alamat menanyakan apakah setelah pengangkatannya sebagai Komut, akan dilanjutkan pergantian jajaran direksi.

Meskipun berkali-kali Sutanto mengelak menjawabnya, berulang kali pula seakan tak jemu wartawan tetap menanyakan hal yang sama.

Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ketika ditanyakan mengenai informasi isu pergantian jajaran direksi pun hanya tertawa-tawa.

"Gue gak tau, jangan tanyakan itu. Apa pun yang terjadi itu di atas [Istana]," ujar Said Didu. (Bisnis Indonesia)

2. BPK Mengirim Surat ke Presiden Yudhoyono

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR terkait dengan tidak terimplementasi sejumlah ketentuan yang ditetapkan dalam paket UU tentang Keuangan Negara.

"Terkait hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BPK menilai bahwa tidak ada upaya menyeluruh dan signifikan dari pemerintah untuk mengimplementasikan paket tiga UU bidang keuangan negara tahun 2003-2004," kata Ketua BPK, Anwar Nasution.

Anwar mengungkapkan, hal itu dalam acara ulang tahun ke-62 BPK di Kantor Pusat BPKB Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, hal itu disebabkan karena baik pemerintah pusat maupun pemda belum berhasil membangun kelembagaan yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita reformasi di bidang keuangan negara.

"Yang dimaksud dengan lembaga atau institusi bukanlah sekedar unit organisasi maupun jenjang hierarki jabatan seperti pejabat pemerintah pusat dan daerah termasuk gubernur, bupati/walikota maupun pimpinan serta bendahara proyek. Lembaga juga sekaligus termasuk sistem yang meliputi aturan main dan tata cara maupun norma-norma yang mengatur perilaku serta cara interaksi antar sesamanya. Pada gilirannya, tata cara lembaga berinteraksi menentukan motivasi maupun sikap dan perilakunya. Di samping itu, ternyata banyak pula UU dan peraturan yang belum seluruhnya selaras dan malah saling bertabrakan satu sama lain.

Oleh karena itu, target jadwal penerapan ketiga UU itu, khususnya dalam hal pengintegrasian seluruh rekening negara ke dalam suatu treasury single account dan peralihan anggaran dari yang berbasis ka ke berbasis akrual pada 2008 pun tidak tercapai. "Untuk itu, BPK telah menulis surat kepada presiden dan Ketua DPR dan menyarankan agar mengamandemen berbagai ketentuan yang menyangkut target waktu implementasi paket tiga UU tersebut," tegas Anwar. BPK sekaligus menyarankan agar Presiden langsung memimpin dan mengawasi pelaksanaan perubahan sistem pengelolaan keuangan negara. (Antara)

3. Govt to announce fuel prices cuts today

The government is set to announce lower gasoline and diesel prices Monday afternoon after a Cabinet meeting to be held at the Presidential Palace, *tempointeraktif.com* has reported.

"We have calculated the percentage reduction which we'll announce after the meeting," Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro said Sunday.

The government's move is in response to the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) suggestion that subsidized gasoline and diesel fuel prices be reduced to Rp 4,500 (41 US cents) and Rp 4,300 per liter, respectively.

The government had cut gasoline and diesel fuel prices to Rp 5,000 and Rp 4,800 in December, following the fall in crude oil prices on the international market. (The Jakarta Post)

4. 16 Januari 2009, Fiskal Berlaku di Belawan

Penerapan tarif fiskal ke luar negeri (FLN) melalui jalur laut, di Pelabuhan Internasional Belawan, mulai berlaku tanggal 16 Januari 2009, bagi WNI yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kepala Operasional PT. Amalia Amanda, Ides, di Belawan, Senin (12/1), mengatakan, hingga kini sampai dengan 15 Januari mendatang Kantor Pembayaran Fiskal di Pelabuhan Belawan masih melakukan sosialisasi.

Menurut dia, sosialisasi dan penanguhan pemberlakuan fiskal itu merupakan kebijakan yang diambil oleh kantor pajak setempat.

Namun, setelah pertengahan Januari 2009 maka pembayaran fiskal sebesar Rp1 juta per orang akan dikenakan bagi WNI yang tidak memiliki NPWP dan telah dewasa atau berusia 21 tahun.

Pembayaran fiskal juga tidak berlaku bagi pelajar atau mahasiswa dan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sumut yang akan bekerja atau sedang cuti bekerja dari negeri jiran Malaysia yang dibuktikan dengan sejumlah dokumen.

"WNI yang berusia 21 tahun ke atas yang dikenakan fiskal, sedangkan mereka yang belum dewasa tidak dikutip. Begitu juga dengan para mahasiswa serta TKI," jelas dia.

Sebelumnya terhitung 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010 pemerintah memberlakukan tarif FLN bagi WNI yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun sebesar Rp2,5 juta untuk angkutan udara dan Rp1 juta untuk angkutan laut tiap kali keberangkatan ke luar negeri.

Sementara itu, Kepala Terminal Penumpang Pelabuhan Belawan, T. Jhoni, mengatakan, dewasa ini pergerakan penumpang yang turun dan berangkat pada rute pelayaran internasional Belawan-Penang, Malaysia masih normal.

Dalam sepekan sedikitnya terdapat tiga kali pergerakan kapal fery cepat MV Express Bahagia dan MV Kenangan secara bergantian yakni setiap Senin, Rabu dan Jumat tiba di Belawan dan Selasa, Kamis dan Sabtu berangkat ke Penang dan pelayaran internasional itu dikelola oleh PT. Amalia Amanda. (Jurnal Nasional)

C. SOSBUD

1. Standar Kelulusan UN Dinaikkan Jadi 5,50

Ujian Nasional (UN) tahun ini dinaikkan menjadi rata-rata minimal 5,50 sedangkankan tahun lalu 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Sedangkan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.

Hal itu dikatakan Ketua BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Mungin Eddy Wibowo dalam konferensi pers mengenai pelaksanaan Ujian Nasional 2009 di Gedung Depdiknas, Senin (12/1).

"Kami terus meningkatkan standar dengan tujuan peningkatan kualitas anak didik, diharapkan tiap tahun dapat terus meningkat. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN," ujar Mungin.

Dikatakan Mungin, ujian nasional tahun ini tiap hari hanya akan diujikan satu mata pelajaran, kecuali hari pertama ujian untuk SMA/MA agar anak didik lebih konsentrasi. "Memang UN untuk SMA/MA akan lebih panjang waktunya, yakni selama 5 hari mulai 20 April hingga 1

Mei. Tetapi hanya hari pertama akan diujikan dua mata pelajaran, karena keluhan dari para siswa pada penyelenggaraan UN tahun lalu,” tambahnya.

Sedangkan untuk UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) SD/MI/ SD LB (Sekolah Dasar Luar Biasa) tetap akan dilakukan pada 11-13 Mei 2009. Mata pelajaran yang diujikan juga masih sama yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Jumlah siswa yang akan mengikuti UN, dikatakan Mungin, dari data sementara yang didapat Diknas mencapai 1.593.650 siswa. “Kami masih menunggu hasil pertemuan dengan seluruh kepala dinas yang akan dilakukan besok,” katanya. (Kompas)

D. HANKAM :

1. Alutsista Pengadaan Kapal Selam Terbangkalai

TNI Angkatan Laut (AL) dan Departemen Pertahanan (Dephan) berbeda pendapat soal pengadaan kapal selam. Perbedaan tersebut terkait dengan waktu pengadaannya. Dephan menginginkan pengadaan kapal selam ditunda pada masa 2010-2014, sementara TNI AL mengharapkan kontrak pengadaan tetap dilakukan pada tahun 2009 ini.

Namun demikian, baik Dephan maupun TNI AL membantah adanya tarik-menarik soal pengadaan kapal selam ini. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) AL Laksamana Pertama Iskandar Sitompul menyatakan, TNI AL tidak mempermasalahkan jenis kapal selam. TNI AL hanya memberikan spesifikasi mengenai kapal selam yang dibutuhkan. Spesifikasi tersebut sudah selesai.

Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dephan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin menyatakan, pengadaan kapal selam tersebut agar ditunda hingga periode 2010-2014. “AL mengharapkan ada cara lain. Misalnya, kontrak bisa tetap dilakukan pada tahun 2009, tetapi realisasinya 2-3 tahun ke depan, atau pada 2009-2012,” kata Sjafrie ketika dihubungi SH, Kamis (8/1).

Meski mengharapkan tidak ada perubahan, kata Iskandar, TNI AL akan mengikuti kebijakan pemerintah. “Tidak ada tarik-menarik. TNI AL membuat spesifikasi dan Dephan yang memutuskan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana Pertahanan Dephan (Ranahan) Marsda TNI Eris Heryanto yang dihubungi secara terpisah menyatakan, Dephan tidak akan menunda pengadaan kapal selam. Pasalnya, anggaran untuk pengadaan kapal tersebut sudah disetujui pemerintah. Namun, untuk melakukan pengadaan tersebut perlu tender terbuka.

“Prosesnya itu pada saat ini. Tidak ada tarik-menarik. Dephan tidak berkepentingan,” paparnya.

Sangat Diperlukan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan ego sektoral dalam TNI tidak mengganggu pengadaan kapal selam bagi TNI Angkatan Laut (AL) yang seharusnya direalisasikan tahun 2009 ini. “Keberadaan kapal selam saat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di mata internasional. Selain itu, kapal selam juga diperlukan untuk menjaga pulau terluar maupun berbagai pelanggaran hukum di perbatasan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusron Ihza Mahendra ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/1).

Yusron mengatakan jika ada perubahan waktu pengadaan kapal selam, Dephan harus menyampaikannya kepada DPR. Sebab, anggaran bagi pengadaan kapal selam tersebut keluar berdasarkan persetujuan parlemen. DPR sendiri, kata Yusron, tidak menginginkan adanya penundaan pengadaan kapal selam. Hal ini mengingat sebagian besar atau sekitar 60 persen wilayah Indonesia terdiri dari lautan sehingga laut harus diberi perhatian. Terlebih lagi, kemungkinan terjadinya perang terbuka juga sangat kecil. Saat ini diplomasi merupakan senjata utama. “Kalau kita punya kapal, kita bisa menaikkan bargaining. Tank itu untuk tujuan defensif, sedangkan kapal selam ofensif. Tren di Komisi I kurang pro terhadap penundaan kecuali ada alasan lain yang logis,” paparnya.

Sejak Tahun 2003

Seperti diketahui, dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI Angkatan Laut 2005-2009, salah satu daftar belanja pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) adalah kapal

selam sebanyak satu unit dan satu unit berikutnya pada Renstra 2010-2014. Renstra 2005-2009 telah mencantumkan pagu anggaran US\$ 350 juta untuk pengadaan tersebut.

Renstra TNI Angkatan Laut 2005-2009 secara resmi sudah tercantum dalam Blue Book Bappenas. Artinya, secara prinsip proyek tersebut masuk dalam kategori disetujui Bappenas dalam hal dukungan pembiayaannya

Dalam periode 2005-2009, penentuan jenis kapal selam sempat mengalami tarik ulur. Pada periode Kasal Laksamana TNI Slamet Soebijanto (2005-2007), menginginkan kapal selam kelas Kilo Type 636 karena dinilai lebih andal daripada kapal selam U-209 Changbogo, lisensi Korea Selatan yang direncanakan oleh Kasal Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh (2003-2005). Kemudian, pada periode Kasal Laksamana TNI Sumardjono (2007-2008), TNI AL kembali mengajukan agar diadakan kapal selam U-209 Changbogo.

Dalam pengadaan kapal selam, Mabes TNI AL akan menentukan spesifikasi teknis dan operational requirement. Soal pembiayaan merupakan tanggung jawab Dephan.

Sejumlah tipe kapal selam yang dipertimbangkan adalah Kilo tipe 636 (Rusia), U-209 dan U-214 (Jerman), serta U-209 Changbogo (Korea Selatan). Secara nominal, yang mahal adalah Kilo tipe 636 dan U-214, harganya berkisar US\$ 350-450 juta, itu pun tergantung spesifikasi teknis kapal selam seperti apa yang dikehendaki pembeli.

Ada keinginan dari TNI Angkatan Laut untuk memanfaatkan Kredit Negara dari Rusia sebesar US\$ 1 miliar bagi pendanaan kapal selam dari Rusia. Saat ini TNI Angkatan Laut baru memanfaatkan kredit itu untuk pengadaan 18 tank amfibi BMP-3 untuk Korps Marinir. (Sinar Harapan)

E. HUKUM :

1. Polling: Jakgung harus usut kasus Munir

Jaksa Agung Hendarman Supandji dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir setelah tersangka Muchdi PR dibebaskan dari tuntutan hukum.

Berdasarkan polling bisnis.com yang digelar sejak pekan lalu hingga hari ini, nama Hendarman paling dinilai bertanggung jawab oleh para pembaca. Sedikitnya 45,98% pembaca memilih nama Jaksa Agung tersebut disusul Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (37,36%) dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (16,67%)

Pertanyaan polling tersebut adalah Muchdi PR dibebaskan dari tuntutan dalam kasus pembunuhan Munir. Siapakah yang paling bertanggung jawab untuk mengungkap kasus ini selanjutnya? Tersedia tiga jawaban dalam polling tersebut yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Jumlah pengisi polling mencapai 174 orang yang ditutup hari ini.

Polling yang digelar secara rutin setiap pekan ini tidak bersifat ilmiah dan hanya mencerminkan pendapat para pembaca bisnis.com. (Bisnis Indonesia)

2. AGO files for an appeal over Muchdi's acquittal

Prosecutors of the Attorney General's Office (AGO) filed an appeal at the Jakarta High Court on Monday to review the South Jakarta District Court ruling acquitting former top spy Muchdi Purwopranjono of charges he had directed the assassination of human rights activist Munir Said Thalib.

Kompas.com reported Monday prosecutor Cirus Sinaga arrived at court offices at 9:30 a.m, and was received by court secretary Lilies Djuaningih. Cirus, however, declined to disclose any details of the prosecutors' arguments in the appeal.

On the last day of 2008, the court released Muchdi after clearing him of all charges, saying prosecutors had not presented sufficient proof the defendant had played a role in Munir's poisoning before boarding a Garuda Indonesia flight headed to Amsterdam Sep. 7, 2004. (The Jakarta Post)

3. KPK Tegas soal Rekening Liar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertindak tegas terhadap lembaga negara yang tetap mengelola rekening liar berindikasi korupsi.

Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi korupsi pada pengelolaan rekening di lembaga negara tersebut, tim penertiban rekening liar yang dibentuk KPK bersama Departemen Keuangan (Depkeu) mulai bekerja pekan ini. Wakil Ketua KPK Haryono Umar menegaskan, sebagai pihak yang diminta menyelesaikan masalah ini oleh Depkeu, KPK akan melakukan penertiban rekening liar berdasarkan hukum.

Jika pada kenyataannya ditemukan rekening liar yang hanya menyangkut administrasi, KPK akan memberikan sejumlah saran untuk perbaikan terhadap lembaga negara. KPK juga bisa mengusulkan pembentukan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur agar masalah ini selesai. "Tapi kalau bertentangan dengan hukum, bisa kita melakukan berbagai upaya, misalnya investigasi (penyelidikan)," ujar Haryono saat dihubungi kemarin.

Sebagaimana diketahui, terdapat tujuh lembaga negara yang memiliki rekening liar dan sebelumnya hal itu telah dilaporkan oleh Depkeu ke KPK. Dalam laporan itu, Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara pemilik rekening liar terbanyak, yakni 102 rekening.

Departemen Sosial (Depsos) memiliki satu rekening senilai Rp29,282 miliar, BP Migas dua rekening senilai USD 10,702 juta, Departemen Pertanian sebanyak 32 rekening yang tidak diketahui nilainya, Departemen Dalam Negeri sebanyak 36 rekening dengan nilai Rp88,57 miliar dan USD51.558, Departemen Hukum dan HAM sebanyak 66 rekening senilai Rp56,82 miliar, lalu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sebanyak 21 rekening senilai Rp 139,438 miliar dan USD 270.573. Pelaporan dilakukan karena Depkeu sudah tidak sanggup mengatasi persoalan rekening liar yang mencapai Rp314,2 miliar dan USD 1,1 juta.

Salah satu rekening yang saat ini telah masuk penyelidikan KPK adalah rekening Yayasan Dana Tabungan Pesangon Pekerja Sektor Minyak dan Gas (Migas) senilai Rp139,419 miliar yang dikelola Depnakertrans. Rp30 miliar dana yang ada di rekening itu digunakan untuk membangun tiga rumah sakit pekerja pada era Menakertrans 2001– 2004. Wakil Ketua KPK M Jasim menyatakan ada sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana di rekening ini.

Dalam pertemuan antara KPK, Depkeu, dan BI, pekan lalu, Depsos adalah satu-satunya lembaga yang telah menyelesaikan masalah rekening liar. Dengan demikian, KPK tinggal menertibkan rekening liar di enam lembaga negara. Sejauh ini, ujar Haryono, belum ada satu pun dari enam lembaga negara itu yang berinisiatif memberi penjelasan ke KPK. "Jadi kita masih mendapatkan informasi dari Depkeu secara global saja," ujar Haryono.

Haryono memperkirakan, kesulitan utama yang dihadapi tim dalam penertiban rekening liar adalah pelacakan mutasi yang terjadi di rekening. Sebab, selain sudah lama, rekening itu juga dalam jumlah yang banyak dan nilainya besar. Juru Bicara MA Djoko Sarwoko menolak jika 102 rekening di lembaganya disebut liar. Rekening itu menurut Djoko resmi dan dibuka berdasarkan kebutuhan MA.

Selain atas dasar kebutuhan, menurut Djoko, setiap rekening MA sah karena telah mengikuti peraturan. "Rekening itu sesuai dengan jumlah pembukuan dan sesuai dengan ketentuan perbankan," ujarnya. Ketentuan perbankan mengatur rekomendasi dan lisensi peruntukan rekening. "Kalau rekening itu untuk pembukuan keuangan kan kata Menkeu tidak liar. Yang dilarang kan kalau rekening dibuat atas nama pribadi," jelas Djoko. Wakil Ketua MA Harifin A Tumpa sebelumnya telah mempersilakan KPK memeriksa rekening milik MA.

MA mendukung setiap upaya penertiban yang dilakukan Komisi Antikorupsi. Untuk mempermudah penertiban rekening liar, Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja sebelumnya meminta keenam lembaga negara untuk kooperatif. KPK berharap, lembaga negara yang memiliki rekening liar bersikap terbuka dan bersedia bekerja sama dalam penertiban keuangan negara ini. (Koran Sindo)

4. Pemberantasan Korupsi Keberhasilan KPK Bukan Prestasi Pemerintahan SBY

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret sejumlah pejabat negara yang terlibat kasus korupsi bukan merupakan prestasi yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, Kejaksaan Agung dan Polri selaku instrumen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, hingga saat ini masih sangat jauh dari harapan publik.

Demikian dikemukakan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro kepada wartawan, di Jakarta, kemarin. Ismed mengatakan, kesuksesan KPK dalam

memberantas korupsi selama ini, tidak ada kaitannya dengan prestasi Presiden SBY. Masalah KPK, kata dia, adalah instrumen negara, bukan pemerintah.

"Soal pemberantasan korupsi, komitmen SBY memang harus diakui cukup baik, terutama sikapnya yang membiarkan KPK menetapkan Aulia Pohan (mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia) sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI kepada sejumlah anggota DPR. Itu sangat besar dampaknya ke depan terhadap semangat pemberantasan korupsi," ujar Ismed. Sehingga, lanjutnya, lingkungan Istana tidak lagi steril dari tuntutan hukum terkait kasus korupsi. Menurut Ismed, menonjolnya kinerja KPK belakangan ini, justru mengangkat citra SBY sehingga dianggap sukses memberantas korupsi.

"Tapi tidak berarti hal itu bisa diklaim semata sebagai sukses SBY, apalagi oleh Partai Demokrat," katanya. Sebab, kata Ismed, sulit dibantah bahwa instrumen pemerintah SBY dalam pemberantasan korupsi adalah Kejaksaan Agung dan Polri. Tapi suka atau tidak suka, fakta membuktikan bahwa kinerja dua instrumen itu sangat jauh dari harapan publik. Bahkan mungkin jauh pula dari harapan Presiden SBY," katanya.

Ia mengatakan hal itu, terkait dengan klaim Partai Demokrat atas sukses pemerintah melalui iklan yang sangat intensif terhadap sejumlah program pemerintah. "Soal perdamaian di Aceh jika dibedah secara komprehensif, tajam dan adil, dikhawatirkan akan ditemukan fakta yang justru bisa menjadi bumerang bagi Partai Demokrat," ujarnya menambahkan.

Pasalnya, kata dia, publik yang mengikuti bagaimana kebijakan itu diproses, diputuskan, sampai kemudian program itu berjalan, mengetahui bahwa Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar justru lebih punya legitimasi untuk mengklaim sebagai pihak-pihak yang menggagas, bekerja keras dan mengawal gagasan itu dilaksanakan atau tidak, sampai kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Namun demikian, untuk membungkus sukses kebijakan pemerintah SBY-JK hanya oleh partai tertentu, sangat tidak elok dalam konteks keutuhan duet Pemerintahan SBY-JK. Bahkan mungkin juga terhadap kelanggengan koalisi antara partai pendukung pemerintah," katanya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Ia mengatakan, menonjolnya kinerja KPK, tidak ada hubungannya dengan pemerintahan SBY. Pasalnya, KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kebijakan pemerintah. "Kalau disebutkan keberhasilan KPK memberantas korupsi sebagai prestasi pemerintahan SBY, itu salah besar. Yang menjadi ukuran prestasi pemerintahan SBY adalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Tapi kedua institusi itu belum menunjukkan kinerja yang signifikan," katanya. (Suara Karya)

F. OLAH RAGA :

1. RI doubles double-up in Super Series

An all Indonesian men's doubles semifinal match ensures the country a ticket to the final of the 2009 Malaysia Super Series, although the nation's singles players crashed out of Friday's quarterfinals.

Top seeds and Olympic champions Markis Kido and Hendra Setiawan will be challenged by a new partnership of Alvent Yulianto Chandra and Hendra Aprida Gunawan in Saturday's meet in Kuala Lumpur.

Defending champions Kido and Hendra easily tamed seniors Luluk Hadiyanto and Candra Wijaya 21-16, 21-18 in 29 minutes. Alvent and Gunawan meanwhile, had to fight hard to defeat Cho Gun-woo and Yoo Yeon-seong of South Korea 21-19, 21-17 in 34 minutes.

The successes, however, could not inspire the singles players.

Men's singles second seed Sony Dwi Kuncoro could not overcome his rival Hsieh Yu Hsin of Chinese Taipei, bowing out 21-15, 22-20 in 34 minutes.

"I underestimated him...apparently he kept leading in the game. I could not find my game and couldn't focus," Sony said.

Indonesia's Simon Santoso conceded to top seed and Olympics silver medalist Lee Chong Wei of Malaysia 21-15, 16-21, 21-11 after more than one hour.

"I tried to slow down the rhythm in the third game but Chong Wei played very fast, very aggressive and put pressure on me. I couldn't handle the pressure," Simon said.

"Chong Wei played very well. He's the number one player, it's easy for him to control the game."

Indonesia has another chance in the women's competition, as doubles team Shendy Puspa Irawati and Meiliana Jauhari unexpectedly sent home the senior and third seeds Vita Marissa and Lilyana Natsir, winning 21-18, 24-22 in 24 minutes.

Eighth seeds Shendy and Meiliana will challenge fifth seeds Yang Wei and Zhang Jiewen of China in the semifinals. Yang and Zhang crushed top seeds Chin Eei Hui and Wong Pei Tty of Malaysia 17-21, 21-19, 21-11 in 50 minutes.

Mixed doubles top seeds Nova Widiyanto and Lilyana easily cruised into the semis after ousting Chen Hung Ling and Chou Chia Chi of Chinese Taipei 21-18, 21-11. Nova and Lilyana, the 2008 Beijing Olympics silver medalists, will now battle Joachim Fischer Nielsen and Christina Pedersen of Denmark. (The Jakarta Post)

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Terjangan Siklon Tropis Charlotte di Indonesia

Siklon tropis Charlotte melintas di sekitar wilayah Indonesia mulai Minggu (11/1) hingga Selasa (13/1).

Siklon ini diprediksi Senin pagi berada pada posisi 16,6° Lintang Selatan (LS), 141,9° Bujur Timur (BT) atau Teluk Carpentaria, 2098 kilometer tenggara Kupang. Siklon Charlotte bergerak dengan kekuatan 30 knot atau 55 kilometer per jam dengan arah timur dengan kecepatan 15 kilometer per jam.

Charlotte diprediksi hari Selasa pukul pukul 07.00 berada pada posisi 17,4° LS, 144,1° BT atau daratan Queensland, 2.346 kilometer tenggara Kupang. Siklon ini diperkirakan bergerak ke timur-tenggara dengan kecepatan lambat dan kekuatan 20 knots (35 km per jam).

Pada 12-13 Januari, siklon tropis Charlotte yang melemah bergerak menuju timur menjauhi wilayah Indonesia seperti terlihat pada gambar 2. Badai tropis tersebut berdampak tidak langsung dengan menimbulkan potensi hujan sedang hingga lebat di sekitar NTB dan NTT.

Gelombang dengan tinggi 3-4 meter berpotensi terjadi di Laut Jawa bagian barat dan tengah, perairan Kai dan Tanimbar. Gelombang dengan tinggi lebih dari 4 meter berpotensi terjadi di Laut Arafura, Laut Aru, dan perairan Merauke. (Kompas)

III. ARTIKEL :

1. Abad 21, Abadnya Asia Oleh Bob Widayahartono, MA

Asia yang mana? Marilah kita mencermati perkembangan kawasan Asia yang dinamis dan sadar akan masa depan bangsa bangsa Asia. Bahkan, seorang Jeffrey D. Sachs, *Director of Earth Institute and Quetelet Professor of Sustainable Development*, Columbia University tanpa ragu menyambut datangnya Abad Asia dalam tulisannya *Welcome to the Asian Century* (January 2004).

Jauh jauh hari ia menyentak para pengamat ekonomi, termasuk di Indonesia. Sachs tidak hanya mengulang-ulang pengamatannya mengenai Asia, tetapi disebutkan munculnya juga India sebagai pemeran makin aktif dalam abad Asia.

Melegakan juga ada seorang Barat yang secara sadar dan obyektif berani setegas itu dan bukan "pem-bebekan" kelompok *hawkish* Amerika Serikat (AS). Kelompok *hawkish* (rajawali yang ganas) yang dalam dirinya tidak menyukai bangkitnya Asia.

Kini, justru AS yang diterjang krisis ekonomi berantakan, sementara bangsa rakyatnya menantikan 20 Januari 2009 dengan angin segarnya yang dibawa Barack Obama Jr. selaku presiden pengganti George Walker Bush.

Asia yang disebut Sachs adalah negara perhimpunan bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Korea Selatan (Koresl), China, Jepang plus India. Mulai tahun 1970 sampai 1995an memasuki tahun 2000, para pemimpin Asia mulai memberdayakan masyarakat keluar dari kemelaratan menuju kemakmuran (*from rags to riches*).

Kenyataan tentang Asia tersebut sejak akhir tahun 1990an merupakan suatu cerita keajaiban tekad manusia (*human spirit*), yang digerakkan oleh budaya produktivitas untuk mencapai kemajuan.

Dalam pandangan Asia, industrialisasi dan modernisasi perekonomian dan masyarakat bukan westernisasi ala AS. Jelas tiada nilai-nilai universal, karena sejarah, budaya, agama dan

sebagainya sangat beragam antara negara negara. Jelas pula bahwa, penonjolan nilai nilai Asia bukanlah defensif sifatnya dalam interaksi dengan mitra kerja Barat, terutama AS.

Masih cukup banyak ekonom pembangunan (*development economists*) di Indonesia hingga kini masih juga mengagumi dan mendewakan kehebatan elit AS yang tergolong *hawkish*.

Mereka terkesan lupa bahwa kehebatan AS tersebut hanya bersandar pada kemajuan teknologi informasi, produksi dan transportasi. Keunggulan teknologi tersebut tidaklah langgeng karena dalam hitungan satu dua tahun sudah tersedia di dunia. AS yang kini terkoyak oleh kegagalan kegagalan paham neo liberalisme dalam perekonomian sejak tahun 2000an.

Hal menarik adalah bahwa kejaran teknologi oleh suatu negara yang tertinggal dapat menimbulkan kekecewaan kalau negara itu secara politis atau ekonomi tidak mengalami kemajuan atau salah-manaje (*mismanaged*).

Sejak Deng Xiaoping, negarawan China menyuguhkan kebijakan *gaige kaifang*, kebijakan reformasi dan membuka diri awal 1978. Kemudian, Manmohan Singh menjadi Perdana Menteri (PM) India menerapkan kebijakan reformasi ekonomi, kawasan Asia Timur itu mengalami pertumbuhan yang menggerakkan budaya produktivitas kawasan.

Dominasi AS dalam ekonomi sudahlah lalu (*it is over*). Kondisi sekarang ini muncul perekonomian dunia yang diwakili oleh kekuatan ekonomi, Uni Eropa (UE) , Jepang, China yang menjadi kekuatan ekonomi, mesin pertumbuhan Intra-Asia yang makin solid.

India mulai akhir 1990an yang melibatkan diri di bawah kepemimpinan Manmohan Singh juga akan memberi makna pada kawasan ekonomi Asia, demikian juga Korsel.

Proses pembentukan kawasan ekonomi Asia merupakan perjalanan tersendiri. Kelemahan terbesar China adalah dalam proporsi yang sangat kecil dalam sumber daya manusia terdidik.

China hanya memiliki 2,5 juta sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi dan akademi dari jumlah 1,3 miliar penduduk, walaupun manusia China itu ulet, tidak mau menderita terus terusan dan dengan budaya produktivitas yang handal. Andaikata persentase terdidik China yang sama dengan AS, maka China memiliki mencapai 14 jutaan tenaga terdidik perguruan tinggi dan atau akademi.

Keunggulan India adalah dalam jumlah penduduk yang fasih berbahasa Inggris, yakni sekitar 150 juta dari sekitar satu miliar penduduk. Dalam kemajuan mutu penduduk, India berada dalam posisi unggul dibandingkan China, dengan pertumbuhan India sekitar 6% hingga 7%.

Perkembangan Asia sejak awal abad ini menyurutkan anggapan bahwa AS adalah *New Rome* sebagai pemimpin politik, ekonomi sosial dan budaya dunia abad 21.

Asia-lah yang menjadi mercusuarnya abad 21, meskipun bisa saja mengalami beberapa hambatan dalam perjalanan mencapai kemakmuran (*prosperity*).

Keberhasilan Asia semacam itu akan merupakan era kemajuan kemakmuran dan ilmu pengetahuan tidak saja dinikmati oleh Asia, tetapi juga UE, dan juga AS. Hal yang pasti, para pemimpin AS dan intelektualnya harus menyadari bahwa AS hanya hanya menjadi salah satu perekonomian yang makmur dan tidak berhegemoni mendominasi kawasan lain.

Serangkaian hal itulah yang menjadi tantangan riil di Indonesia, terutama kelas menengah untuk aktif membangun manusia yang makin berbudaya produktivitas dan etis, bukan pameran diri penuh janji-janji atau slogan politis melulu. (Antara)

2. Rethinking RI defense policy by Ali Abdullah Wibisono

The first is clean and effective defense spending. Defense allocations should be spent to improve the professional quality of soldiers -- i.e., combat skills and ethics -- as well as make available defense hardware appropriate for Indonesia*s strategic environment. There is an urgent need to avoid waste through kickbacks and bribery, especially in the procurement process.

Second, the Indonesian defense establishment must determine a sustainable plan for developing its defense capabilities to defend the nation, the people and county*s sovereignty, as well as to deter external or potential threats. Only with clear ideas about the threats to national security can a country envision and formulate plans to develop its defense capabilities, because threat perception determines the military*s tasks.

So far, the Defense Ministry, through its defense doctrine issued in January 2008, has indicated that military threats to Indonesia*s national defense include primarily territorial breaches, espionage, armed rebellion. But no less important are the nonmilitary threats that

range from external interventions that exploit democratization and human rights issues, to the country's slow development of science and technology, creating dependence on other nations.

It is critical for civilian political leaders to stop looking at defense policy as a political commodity.

The Indonesian Military (TNI) will not be able to perform well as a deterrent force against external enemies and competitors if it is too deeply mired in the task of confronting these threats. Even worse, the TNI could develop its former role as Praetorian Guard of the state if it takes on nondefense affairs. Overemphasis on internal security has resulted in today's absence of a strategic paradigm, and a defense doctrine that has been too inward-looking in nature.

Meanwhile, this strategic culture has engendered two important characteristics in Indonesia's military. First, the military role as a force for national territorial integrity, which obligates them to prioritize national disintegration as a primary national security threat at all times. Second, the military as a national element stands ready to confront all threats to national security, which gives them a mandate to be involved in domestic nondefense arenas. Recent changes in the military doctrine are significant because they have eliminated all the social and political responsibilities of the military, which may suggest the military no longer aspires to be involved in nondefense affairs.

Unfortunately, Indonesia's defense doctrine suggests an unchanging emphasis on internal threats and a wide variety of nonmilitary responsibilities for the military. Indonesia urgently requires a set of principles to guide its use of force to acquire defense forces capable of mounting a credible deterrent in an international setting. In other words, we need a strategic culture.

There are three long-term steps that should be undertaken in order to shape RI's strategic culture. First, the country should prioritize transforming defense forces into a more efficient organizational structure and advance the defense technologies of each of the branches of the Indonesian military, either through international cooperation or national defense and strategic industries. Advanced technology and efficient military organization will increase the military's ability to perform its roles and reduce casualties in military operations.

Second, security sector reform must not stop at the military, but should involve the police and intelligence agencies. The sooner these two change-resistant institutions reform themselves, the sooner they can fully take over responsibilities for internal security and the military can leave the domestic security realm with confidence. Intelligence agencies need to focus on the gathering and analysis of strategic information with a strong delineation between domestic and foreign mandates, while the police should focus on maintaining social order and law enforcement.

Third, nonmilitary aspects of national defense should not be overemphasized. It is critical for civilian political leaders to stop looking at defense policy as a political commodity. National security should be pursued by all departments in keeping with their competence and resources. The writer is a lecturer at the University of Indonesia's International Relations Department. (The Jakarta Post)

3. BHP Beda dengan BHMN oleh Sukemi

Masyarakat yang kontra terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi undang-undang (UU) hingga kini belum reda. Di beberapa daerah, aksi mahasiswa turun menentang UU itu masih marak.

Dari pemberitaan yang ada di permukaan, mereka yang kontra berpandangan antara lain UU BHP identik dengan pelaksanaan PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) yang kini telah dijalankan oleh tujuh perguruan tinggi negeri. Atas pandangan itu dan dalam praktik PT BHMN selama ini, mereka khawatir pengesahan UU BHP akan menyebabkan biaya pendidikan menjadi makin mahal, akan terjadi komersialisasi dan liberalisasi lembaga pendidikan, serta sulitnya warga miskin atau kurang mampu secara ekonomi, untuk bisa mengenyam pendidikan.

Saya yakin mereka yang beranggapan seperti itu belum sepenuhnya membaca UU BHP, yang jika mau dijabarkan satu per satu justru anggapan itu keliru dan bertolak belakang. Tulisan ini ingin menyampaikan betapa sesungguhnya UU BHP itu memiliki makna untuk melindungi masyarakat dan peserta didik dari berbagai kemungkinan tipu daya pengelola dan pelaksana lembaga pendidikan. Di samping itu, UU BHP merupakan perwujudan dari upaya ingin membangun demokratisasi, otonomisasi dan reformasi di lingkungan dunia pendidikan.

Meluruskan BHMN

Badan hukum pendidikan (BHP) tidak sama dengan BHMN, sehingga praktik BHMN dalam hal upaya penggalangan dana tidak sama dengan peraturan pada UU BHP tentang upaya penggalangan dana.

UU BHP justru akan meniadakan atau meluruskan praktik kurang tepat dari BHMN selama ini dalam hal penggalangan dana. Pada Pasal 41 UU BHP jelas dinyatakan, untuk pendidikan tinggi pemerintah bersama-sama BHPP (badan hukum pendidikan pemerintah) menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Untuk biaya operasional pendidikan tinggi, pemerintah bersama-sama BHPP menanggung paling sedikit setengahnya. Makna dari kata paling sedikit dapat berarti pemerintah dan pemerintah daerah bisa menanggung sampai dengan 100% alias mahasiswa tidak diberi beban pembiayaan. Tentu ini sangat berpulang dari kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah.

Demikian juga untuk pendidikan dasar, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah) dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Jadi untuk biaya penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun, berupa biaya investasi, biaya operasional, maupun beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, semuanya ditanggung negara. Karena itu, peserta didik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta tidak dipungut biaya pendidikan. Untuk pendidikan menengah, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal.

Untuk biaya operasional, pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit sepertiga pada BHPP dan BHPPD. Sekali lagi, kata paling sedikit, memiliki makna kalau pemerintah dan pemerintah daerah dapat, bisa saja menanggung sampai dengan 100%. Itu baru soal biaya operasional. Dalam UU BHP dikenal beberapa biaya, selain biaya operasional ada biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Dengan disahkannya UU BHP, tujuh perguruan tinggi kini berstatus BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP paling lambat 3 (tiga) tahun. Beberapa pasal yang disampaikan ini merupakan salah satu bukti UU BHP tidak seperti yang disuarakan mereka yang kontra.

Bukan hanya itu, ancaman bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan mengikat itu pun akan mendapatkan sanksi dari mulai sanksi administratif dalam berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin, kepada lembaga, maupun sanksi administratif bagi pengelola dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi pidananya pun ada berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), akan dikenakan kepada setiap orang yang menjalankan BHP tidak dengan prinsip nirlaba; setiap orang yang tidak menanamkan sisa hasil kegiatan atau keuntungan lain dari BHP-nya untuk ditanamkan kembali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun; dan setiap orang yang mengalihkan kepemilikan kekayaan milik BHP secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun.

Pada titik ini, sesungguhnya UU BHP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat atau peserta didik dari jerat para penyelenggara lembaga pendidikan yang diselenggarakan dengan semangat bisnis semata dan dalam rangka reformasi penyelenggaraan pendidikan, sebagai badan hukum nirlaba yang profesional.

Lindungi Warga Miskin

Kekhawatiran bahwa warga miskin tidak dapat menikmati pendidikan juga tidak beralasan. Sebaliknya, UU BHP ingin melindungi warga miskin, karena pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) dinyatakan BHP wajib menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik

tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru, dan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berdiri sendiri. Artinya, ada ancaman sanksi administratif yang mengikat baik bagi lembaga maupun pengelola. Tentu masih banyak hal positif yang terkandung dalam UU BHP, dari aspek otonomi yang ingin dijalankan oleh lembaga pendidikan secara penuh hingga proses pengalihan jabatan pegawai negeri sipil (PNS), baik sebagai pendidik maupun tenaga pendidik.

Tapi intinya semua mempunyai tujuan baik, karena logikanya sesungguhnya tidak ada satu negara di mana pun yang menghendaki warganya memiliki tingkat kecerdasan terbelakang. Dalam kasus UU BHP inilah seharusnya pola pikir ini dikembangkan. Semoga. (Koran Sindo)

IV. LAIN-LAIN :

1. Feature: Mercury in gold mining: a Third World toxic threat by Michael Casey

A gold miner stands waist-deep in a polluted pond, dumps a capful of mercury into a bucket of ore and mixes it in with his bare hands.

The darting liquid metal wraps itself around the gold to form a silver pellet the size of a marble.

The use of mercury in gold mining is illegal in Indonesia because it is toxic to both human health and the environment. But the price of gold has tripled since 2001, and mercury is the easiest way to extract it.

"Of course I'm worried," said miner Handoko, 23, a grim man in a baseball hat who goes by one name. "But this is the job."

Tens of thousands of remote mining sites have sprung up mostly in Asia, Latin America and Africa, using as much as 1,000 tons of mercury each year. The mercury ravages the nervous system of miners and their families. It also travels thousands of miles in the atmosphere, settling in oceans and river beds in Europe and North America and moving up the food chain into fish.

Small-scale gold mining is the second-worst source of mercury pollution in the world, after the burning of fossil fuels. And Indonesia ranks behind only China in the use of mercury in gold mining.

Mercury's impact is evident in mining regions like Central Kalimantan, on the island of Borneo. Acres of tropical forest are now virtual desert. Villagers say fish populations have dropped by 70 percent. The Galangan gold mining site stretches several miles, stripped of trees and dotted with mercury-laced ponds.

"This area is finished," said Fauzi Achmad, a gold shop owner, as he drove past the moonscape-like dunes and abandoned mine sites.

Despite the hazards, buying mercury at gold mining sites is as easy as purchasing toothpaste. The international trade in mercury is largely unregulated. And most of the 55 countries where small-scale gold mining is rife lack the political will or capacity to prevent the toxic metal from falling into the hands of 10 to 15 million poor miners.

"The continued use of mercury in gold mining threatens millions of people all over the world, since mercury is a global air pollutant," said Michael Bender, a coordinator for the Zero Mercury Working Group, a coalition of 40 groups worldwide that campaigns to reduce mercury use. "We're talking about a neurotoxin that science clearly shows threatens pregnant women, their fetus and those who eat large amounts of fish."

The use of mercury in gold mining goes back thousands of years. The Romans forced slaves and criminals to extract gold and silver with mercury.

By the 20th century, mining companies had abandoned mercury in favor of chemicals like cyanide. But small-scale miners like it because it's easy to use, fast, cheap and leaves the gold cleaner than traditional panning.

"The miner cannot be separated from the mercury," said Achmad, the gold shop owner, who has campaigned to persuade miners to use less mercury. "With mercury, it makes the work fast."

Traders once relied on mercury from Spain, Algeria, China and Kyrgyzstan, but most mines are now shut and China only supplies its own market. So mercury comes from the leftover stockpiles of shuttered mines or the dozens of companies in Europe and the United States that recycle the metal from old light bulbs, batteries or industrial waste, according to the U.N. and the Zero Mercury Working Group.

Flasks of mercury worth hundreds of dollars are sold into an opaque and largely unregulated network of brokers who crisscross the globe, according to Peter Maxson, a Brussels-based expert on the trade. They divert mercury supplied for legal purposes to the gold mines instead, where it can fetch prices 10 times higher than on the global market, he said.

"Countries import several hundred times the mercury they need for dental and other legal uses," said Pablo Huidobro, project manager for the U.N. Industrial Development Organization's Global Mercury Project. "The excess makes its way to the miners through the black market."

Maxson and other experts said it can be almost impossible to track the liquid metal as it passes through brokers and even criminal gangs on its way to a gold mine. A flask of mercury can originate in Spain, be sold to brokers in India, go on to popular transit points like Singapore or Vietnam and then get dumped in Indonesia.

The United States alone exported nearly 498 tons of mercury in 2007, up from 378 tons in 2006. It mostly was sent to Canada, Suriname, Hong Kong and Mexico, according to the U.S. Geological Survey.

"The whole trade has gone underground in the last five to 10 years. It's very secretive," Maxson said. "The companies dealing mercury won't tell you who their customers or even who the end users are."

Experts in the trade say D.F.G. Mercury Corp. and Bethlehem Apparatus are among the top suppliers of mercury worldwide. Robert Goldsmith, president of D.F.G. Mercury Corp. of Evanston, Ill., said he sells his mercury domestically but acknowledged it can be difficult to determine what happens to it. Bruce Lawrence, president of Bethlehem Apparatus in Hellertown, Pa., declined to discuss the trade. On its Web site, Bethlehem describes itself as a global supplier of prime virgin and high purity mercury.

Mercury traders say it's unfair to blame them for what happens at gold mining sites. "If people don't want mercury to be used in artisanal gold mining areas, particularly in China, Indonesia and South America, then they should stop importing it," said Howard Masters, the managing director of Lambert Metals International, a British company that sells 25,000 to 30,000 flasks of mercury yearly worldwide.

"It is up to the governments themselves, as all imports into these countries are only allowable under license," he said. "But don't stop genuine consumption of mercury around the world, where it has very good uses and is not an environmental problem when used correctly."

Marc Claushuis, director of the Dutch firm Claushuis Metals, which sells 200 tons of mercury each year to Latin America, Africa and Europe, expressed frustration over his inability to control its use. "Of course, I feel unhappy ... You send your end product to countries where you know it gets a lot of pollution," he said. "There is not so much you can do."

Once in Indonesia, mercury is trafficked through chemical shops in big cities like Surabaya or Jakarta and transported to mine sites in energy drink and vitamin bottles to avoid detection. It ends up behind the counters of gold shops in Central Kalimantan, Papua and North Sulawesi.

Indonesia periodically tears down illegal gold mining camps and slapped a ban on mercury use in mining three years ago, but mercury prices then doubled. Irwanto Thomas, a government environmental official in Central Kalimantan, acknowledged that mercury is widely used and will remain so until miners have better opportunities. "They ask what job we can provide them," Thomas said. "Until now, the government has not provided them with an answer."

The dusty main street of the Indonesian gold mining town of Kerengpang is lined with dozens of gold shops. It takes only a gentle inquiry to send a shop owner scurrying to a back room for the mercury.

"Sometimes, I sell mercury to the miners or just give it to them for free," said gold shop owner Rachmadi, who also trades gold for mercury.

Mercury is easily found at most mining sites worldwide. In Africa, miners buy it in small plastic bags stored in Tupperware containers or Vitamin C tubes. In Peru, it is sold in dental shops.

In gold mines, as much as one to three grams of mercury are lost for every gram of gold produced. But mercury is a slow and silent killer, so miners scoff at health concerns. They recall

how they breathed mercury fumes or handled the toxic liquid for years with no problems. Some Indonesian miners have even smeared mercury on their skin in the belief it will make them stronger, according to a U.N. report.

"Sometimes the gold and mercury gets said Sumardianto, a jovial 36-year-old miner who has dug for gold in Central Kalimantan since 1996 and lives in a tented camp with his wife. "I'm OK. I don't have any illnesses. I don't worry about using mercury."

Numbers of people killed or disabled by mercury are impossible to nail down, experts say. But tests on miners in Indonesia, the Philippines, Colombia, Guyana, Zimbabwe, Tanzania and Brazil found mercury levels up to 50 times above World Health Organization limits, according to a 2006 U.N. report. Symptoms such as reduced motor skills, fatigue and weight loss are routine at mining sites, the U.N. said. Gold shop owners also breathe the mercury vapor they burn off.

The U.N. has spent \$7 million in six countries, including Indonesia, to educate miners and gold shops about mercury. The European Union agreed earlier this year to ban mercury exports from 2011. And President George W. Bush signed a bill in October sponsored by Sen. Barack Obama, now president-elect that bans all elemental mercury exports by 2013.

Mercury recyclers argued that bans would promote the mining of more mercury and shift the export trade from Western countries to developing nations like India.

Already, 83 percent of mercury in the U.S. is believed to come from abroad, according to the U.S. Environmental Protection Agency, and 44 states have issued health advisories about eating contaminated fish.

"What is motivating governments at the highest level is a strong recognition that mercury is a global pollutant," said Kevin Telmer, an expert on small-scale mining at the University of Victoria in Canada. "It's clear that small-scale mining is adding to the global mercury problem."

2. Wawancara Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda: Indonesia Konsisten Dukung Palestina

Agresi militer Israel ke Jalur Gaza dengan dalih menghentikan serangan militan Hamas ke wilayahnya adalah penjajahan dengan kedok pemberantasan terorisme. Israel kian jauh menduduki wilayah-wilayah Palestina, dan dengan dukungan AS, Dewan Keamanan PBB pun tak berputus.

Menteri Luar Negeri Indonesia Nur Hassan Wirajuda sadar betul bahwa perjuangan diplomasi melalui meja Dewan Keamanan PBB sangat sulit diharapkan. Itu sebabnya Dubes atau Perwakilan Tetap Indonesia di PBB lebih memilih menggelar sidang darurat (emergency session) Majelis Umum PBB.

"Saya skeptis dengan struktur Dewan Keamanan saat ini," katanya saat menyampaikan pernyataan pers tahunan di Jakarta, Selasa lalu. Berikut petikan penjelasannya mengenai konflik Israel-Palestina, seperti disampaikan kepada wartawan *Suara Karya* **Mohammad Hasyim** dan fotografer **Hedi Suryono**.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghentikan agresi Israel di Gaza?

Situasi di Palestina merupakan the mother of all conflicts. Dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel, menyusul partisipasi Indonesia dalam Annapolis Conference, November 2007, Indonesia juga diundang pada konferensi Paris pada Januari 2008, guna memberikan dukungan ekonomi kepada Palestina. Kita masih melihat celah dari negara itu, sehingga mengambil inisiatif mengadakan the Asia Africa Conference for Capacity Building on Palestine. Ini sebagai sumbangsih kita dan bangsa-bangsa Asia Afrika bagi persiapan negara Palestina merdeka.

Keanggotaan Indonesia di DK PBB juga ditutup dengan peran aktif kita dalam pembahasan mengenai situasi di Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Memperhatikan kegagalan Dewan Keamanan untuk menjalankan mandatnya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, maka Duta Besar atau Wakil Tetap Indonesia di PBB telah menyampaikan surat kepada Ketua Gerakan Non-Blok untuk mensponsori pertemuan khusus (emergency session) Majelis Umum PBB, guna melakukan sidang darurat mengambikan resolusi berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB mengenai Uniting for Peace Resolution. Surat Indonesia telah diedarkan.

Bagaimana tanggapan negara-negara Non-Blok atas usulan Indonesia itu?

Gerakan Non-Blok (GNB) sekarang terdiri dari 117 negara. PBB memiliki 192 negara anggota. Dengan kata lain, GNB sendiri sudah mempunyai mayoritas di PBB. Tapi kita perlu mendapatkan mayoritas sebanyak-banyaknya agar bobot suara bagi penyelenggaraan emergency session di Majelis Umum PBB ini lebih kuat. Saya yakin, seluruh anggota GNB mendukung upaya ini karena posisi GNB secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dari pendudukan militer Israel untuk merdeka. Dengan kata lain, saya optimistis tidak hanya seluruh negara anggota GNB yang bulat mendukung usulan Indonesia ini, tetapi juga negara-negara anggota PBB lainnya.

Apakah emergency session itu dimungkinkan?

Emergency session dari Majelis Umum PBB diadakan dengan asumsi bahwa Dewan Keamanan telah gagal dalam menjalankan mandatnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sudah dua kali sejak terjadinya agresi militer Israel ke Jalur Gaza, akhir Desember lalu, diadakan pertemuan Dewan Keamanan, itu pun sifatnya informal. Tetapi tidak ada kesepakatan dalam pertemuan itu untuk menghasilkan resolusi. Sementara situasi di lapangan, dengan serangan darat yang diluncurkan Israel, situasi semakin memburuk. Korban yang meninggal makin besar. Karena itu, dunia tidak dapat membiarkan kebiadaban ini terus berlangsung.

Kalau kita menengok sejarah Summer (musim panas) 2006, dengan metoda yang sama, Gaza diserang, kemudian ada tindak balasan dari Hizbullah di Lebanon selatan, selama sebulan atau 32 hari Lebanon selatan digempur hingga 3.000 orang menjadi korban. Selama 32 hari itu Dewan Keamanan tidak melakukan apa-apa.

Kita belum menjadi anggota (tidak tetap) Dewan Keamanan pada waktu itu. Kita juga menyesalkan Liga Arab yang tidak melakukan apa-apa. Organisasi Konferensi Islam (OKI) pun tidak melakukan apa-apa. Inisiatif kita pada waktu itu pada Ketua OKI, Malaysia, adalah mengadakan emergency session di Kuala Lumpur. Dengan itu dibulatkan suara untuk menekan agar Dewan Keamanan mengadakan sidang.

Saya ingat sebagian conversation saya dengan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice di Kuala Lumpur. Saya katakan bahwa dengan pembiaran perang yang mengakibatkan korban sedemikian besar juga mengakibatkan radikalisisasi, dan menyulitkan upaya memerangi terorisme.

Karena itu, kita mendesak agar Amerika tidak membiarkan itu terjadi. Jawaban Condoleezza Rice waktu itu, "I fully understand. And I don't want to loose you." Karena bagaimana pun Indonesia dihitung sebagai negara yang berhasil dalam memerangi terorisme. Karena itu, dari Kuala Lumpur beliau langsung terbang ke Middle East dan beberapa hari kemudian diadakan emergency session Dewan Keamanan, yang memutuskan cassation of hostilities (penghentian permusuhan), cease-fire (gencatan senjata), dan menetapkan kembalinya pasukan perdamaian di bawah PBB. Bahkan kita menjanjikan bahwa kalau pasukan perdamaian itu dibentuk kembali, UNIFIL, maka kita akan menyumbangkan 1.000 anggota pasukan. Dan itu kita tepati.

Nah, kalau kita bandingkan situasi musim panas 2006 dengan situasi di Gaza sekarang, itu hampir sama. Oleh karena itu, dengan kegagalan Dewan dalam dua pertemuan terakhir, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat internasional sesuai dengan Piagam PBB Pasal 51 untuk mendesak emergency session dari Majelis Umum PBB.

Upaya ini dilakukan, di samping secara nyata, kita juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sekitar 1 juta dolar dan obat-obatan yang sudah disampaikan beberapa hari lalu melalui Yordania. Kita konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Bagaimana dengan keinginan sejumlah sukarelawan yang ingin berjihad ke Palestina?

Tentang respons masyarakat kita yang menunjukkan simpati bagi rakyat Palestina, ini merupakan sesuatu yang pemerintah sangat hargai. Tetapi kita sependapat bahwa dukungan, simpati, dan bantuan yang akan kita berikan harusnya juga efektif. Apakah pengiriman sukarelawan untuk berjihad di wilayah Gaza akan efektif? Tentunya kita berkewajiban untuk

menjelaskan kepada pihak yang akan dibantu, apakah bantuan sukarelawan dalam bentuk pasukan berjihad itu yang mereka perlukan? Belum tentu. Tapi ada cara lain yang bisa jadi lebih efektif.

Kemarin Presiden menerima Duta Besar Palestina. Dubes Palestina justru menyampaikan keperluan-keperluan yang mereka butuhkan dari negara-negara yang mendukung perjuangan bangsa Palestina. Utamanya adalah obat-obatan dan peralatan medis karena mereka sangat kekurangan.

Apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kapasitas bangsa Palestina?

Asumsi kita, dalam lima tahun ke depan, negara-negara Asia Afrika bersama-sama dapat menargetkan pelatihan bagi 10.000 warga Palestina. Dari 10.000 itu saya optimistis, Indonesia setidaknya bisa menyumbang 1.000 pelatihan bagi warga Palestina. Dan, kita sudah mulai, dalam Pusdiklat Deplu kita melibatkan warga Palestina, juga dalam pelatihan microfinancing.

Kita tidak bermaksud hanya meluncurkan konferensi Asia Afrika tentang capacity building, tetapi kita juga sudah membicarakan plans of action. Karena itu, kita sudah duduk bersama dengan wakil pemerintah Palestina dan pejabat Afsel selaku co-sponsor dari proses ini.

Hambatannya situasi di Palestina sendiri. Kita maklum, tetapi tidak mengurangi niat kita untuk benar-benar mewujudkan secara nyata goodwill kita untuk membantu peningkatan kapasitas bangsa Palestina. (Suara Karya)

V. EDITORIAL :

1. Easing the traffic

It is commendable that the Jakarta administration is going all out to ease traffic congestions on many roads across the capital as the problem has long been the cause of daily misery for millions of motorists and makes the capital among the world's most polluted cities. Policies to address the problem, therefore, should no longer be based on "trial and error", but must be well-planned and thoroughly prepared so as to ensure their effectiveness in easing congestion.

We question whether the city administration's plan to introduce a new office-hours scheme to stagger rush-hour congestion was based on a careful study or is only another "trial and error" policy such as those that have been frequently implemented in the past.

The new policy will divide the city into three zones, each with its own recommended starting hours: 7:30 a.m. for offices in Central and North Jakarta, 8 a.m. for offices in West and East Jakarta, and 9 a.m. for those in South Jakarta.

The administration expects that the combination of the new school-hour and office-hour policies will be able to reduce traffic congestion by up to 26 percent.

What we have seen from the results of the new school hours in their first week of implementation has not bowled us over with delight.

We believe that all effort to ease congestion should be aimed at reducing urban commuters' dependency on private vehicles, which far outnumber the capacity of Jakarta's roads. Police data shows there are more than six million vehicles (cars and motorcycles) on Jakarta's roads everyday. The number of vehicles in the city is forecast to grow 11 percent every year. Therefore, without serious efforts to curb the people's dependency on private vehicles, congestion will increase.

The city administration has taken measures to reduce traffic congestion. The inner city turnpikes were constructed in the early 1980s, followed by the expansion of flyovers and underpasses, all aimed at giving motorists more space. The city has also introduced the "three-in-one" policy that requires each car entering certain main thoroughfares in Jakarta to have at least 3 people inside.

Unfortunately, all of those efforts have not been able to solve the chaotic traffic congestion. The expansion of road infrastructure did not permanently solve the traffic jams, as the number of vehicles has ballooned. The three-in-one system has also failed to discourage travelers not to travel by private vehicle, as many poor people are happy to hop in the back seat at the request of a driver of an under-populated car for a few thousand rupiah.

The city is now also considering a number of policies -- including electronic road pricing (ERP) and the police's registration-number-based restrictions -- which restrict vehicle movement in the city on certain days according to license plate numbers.

The city authorities may continue to close roads and redirect traffic as they see fit, but until they find a sustainable solution for the number of vehicles on the streets, the congestion will continue to worsen.

Therefore, we really hope that the city administration will go ahead with its effort to improve public transportation -- deploying many more buses along the busway corridors and developing other mass rapid transit systems, such as subway, monorail and conventional railways.

And in this era of information and technology, efforts to solve the traffic problems could include the promotion of a "home office" system, where office tasks are executed by workers from their homes, meaning they do not need to travel to their offices as frequently.

It seems that Jakartans cannot rely on policies made by the city administration to ease traffic congestion in the city, and that all stake holders -- NGOs and private businesses -- need to contribute as well to solving the problems.

While we are waiting for the city administration to find viable solutions, other stakeholders, particularly the business community, may also use the available technology to ease the burden on the city's roads, including by promoting the home office. Any applicable measure deserves a try, doesn't it? (The Jakarta Post)

2. Rakyat belum Nikmati Turunnya Harga BBM

Singkirkan dulu prasangka bahwa langkah pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya mendongkrak citra politik menjelang Pemilu 2009.

Jujurlah menjawab, apa yang sudah dirasakan publik setelah harga BBM turun? Belum ada. Harga bahan-bahan pokok tetap bertengger di awang-awang dan tarif angkutan tidak bergerak turun. Alasannya banyak dan kilahnya pun segudang.

Berbeda benar ketika harga BBM dinaikkan. Begitu harga BBM naik, pengusaha bahan pokok dan angkutan segera menaikkan harga dan tarif angkutan. Bahkan, naik tidak proporsional. Contohnya, pada 24 Mei 2008 pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 28,7%. Harga premium melonjak dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter dan solar melompat dari Rp4.300 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Hanya dalam hitungan jam harga-harga pun berlomba dinaikkan, bahkan tidak terkendali.

Ongkos angkutan, yang semestinya diatur pemerintah, secara sepihak ditentukan sendiri oleh pengusaha dengan menerapkan tarif gelap. Sepekan kemudian tarif angkutan umum resmi naik sebesar 15%. Harga BBM itu bertahan enam bulan. Tatkala harga minyak dunia turun di bawah US\$60 per barel, pemerintah merevisi harga BBM dalam negeri. Sejak 1 Desember 2008 harga premium turun Rp500 per liter menjadi Rp5.500 per liter.

Dua pekan kemudian, pada 15 Desember 2008 lagi-lagi pemerintah menurunkan harga premium menjadi Rp5.000 per liter. Harga solar pun terjun menjadi Rp4.800 per liter. Pada 15 Januari nanti pun harga premium dan solar turun lagi masing-masing Rp500 per liter.

Akan tetapi, sekalipun dalam tempo kurang dua bulan pemerintah tiga kali menurunkan harga BBM, pengusaha belum juga tertarik menghitung berapa besar harga bahan pokok dan tarif angkutan harus turun. Menghitungnya saja tidak tertarik, apalagi menurunkan harga.

Karena itu, beralasan jika Presiden gerah kemudian menggelar sidang kabinet membahas soal harga. Presiden berharap para pengusaha adil dan fair terhadap masyarakat. Jangan saat harga BBM naik pengusaha menuntut harga segera naik, tapi ketika harga BBM turun pengusaha menahan harga. Pengusaha memang selalu kreatif dan cerdas menghitung saat harga naik, tapi kemudian menjadi bodoh dan bebal menghitung saat harga BBM turun.

Argumentasinya pun sesukanya. Saat BBM naik, pengusaha beralih bahwa BBM merupakan komponen utama harga. Tapi saat harga BBM turun, alasan pengusaha lain lagi. BBM bukan komponen utama harga. Benar-benar mau menang sendiri. Bandar transportasi pun sama. Tarif tidak turun karena harga suku cadang mahal. Para sopir pun berkilah setoran kepada pemilik angkutan juga tidak turun. Kita prihatin dengan sikap pengusaha yang mau enak sendiri.

Pemerintah seharusnya menekan pengusaha agar menurunkan tarif angkutan. Pengusaha seharusnya bersikap adil, arif, dan fair terhadap masyarakat karena masyarakat adalah pasar utama. Mengabaikan pasar utama sama dengan bunuh diri. Kita khawatir jika harga

tidak segera turun, masyarakat berpaling ke pasar gelap yang pasti lebih murah. Akibatnya, penyelundupan akan marak dan yang berteriak meminta perlindungan adalah pengusaha.

Dampak yang sudah terasa dari penurunan harga BBM adalah dampak politis. Citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla berangsur pulih setelah melorot pascapenaikan harga BBM pada Mei tahun lalu. Kita berharap penurunan harga BBM tidak menjadi ajang pameran citra politik elite negeri, tapi harus berakibat langsung bagi turunnya beban kehidupan khalayak banyak. (Media Indonesia)

3. Resolusi DK PBB 1860 Diabaikan

Setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi mengenai gencatan senjata antara Israel dan milisi Hamas di Jalur Gaza, Jumat (9/1), ternyata seruan itu tidak digubris oleh kedua pihak yang bertikai. Kedua pihak bahkan makin sengit melancarkan gempuran dan serangan balasan, dan korban di kalangan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, terus berjatuhan.

Ada sejumlah butir yang diserukan dalam Resolusi DK PBB No 1860 mengenai Situasi di Jalur Gaza, yakni 1) pihak-pihak yang bertikai mau mengadakan gencatan senjata dan Israel mundur dari Gaza, 2) penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza hendaknya tidak dihambat, 3) semua anggota PBB diminta membantu upaya internasional mengatasi situasi perekonomian di Gaza, 4) mengutuk semua bentuk kekerasan dan terorisme terhadap warga sipil, 5) menyerukan kepada para anggota PBB agar meningkatkan upaya guna memberikan pengaturan dan jaminan di Gaza bagi suatu gencatan senjata yang langgeng, 6) mendorong dialog antar-Palestina, 7) mendorong upaya penciptaan perdamaian yang menyeluruh Israel-Palestina atas dasar prinsip dua negara.

Sebagai respons atas resolusi itu, angkatan bersenjata Israel menggencarkan serangan mereka terhadap sasaran-sasaran yang diperkirakan menjadi fasilitas yang digunakan oleh Hamas untuk meluncurkan roket ke wilayah-wilayah Israel. Menurut pemerintah Israel resolusi PBB itu tidak efektif menghentikan aksi serangan Hamas sehingga serangan militer tidak akan dihentikan. Israel baru akan berhenti bila dirasa telah berhasil mengakhiri aksi roket Hamas. Sementara itu, Hamas juga tidak mau mematuhi resolusi itu karena kelompok ini marah tidak dilibatkan dalam konsultasi pada upaya diplomasi di Dewan Keamanan PBB yang menghasilkan resolusi ini. Selain itu Hamas menilai tuntutan mereka agar semua lintasan di perbatasan Gaza dibuka (karena ditutup oleh Israel dan Mesir) dipenuhi.

Dalam pandangan kita ada sejumlah hal yang tidak mungkin dicapai oleh kedua pihak melalui pengabaian gencatan senjata ini. Pertama, sangat sulit bagi Israel untuk membungkam sama sekali serangan-serangan roket yang dilancarkan Hamas, kecuali ia meratakan seluruh Gaza yang berarti akan menimbulkan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Kedua, serangan-serangan roket Hamas pada dasarnya adalah bentuk perlawanan atas blokade Israel terhadap Gaza, menyusul kemenangan kelompok ini pada pemilihan umum 2006, yang hasilnya ditolak Israel.

Ketiga, upaya perdamaian antara kedua pihak secara langsung tampaknya tidaklah mungkin, bila tidak ada pihak ketiga yang terlibat memberikan mediasi, apalagi selama masyarakat internasional (baca: Barat) menolak mengakui Hamas yang secara de facto menguasai Gaza. Itu sebabnya gencatan senjata enam bulan yang berakhir pada 16 Desember lalu berujung pada bentrokan ini, karena Israel melihat gencatan senjata dimanfaatkan Hamas untuk menumpuk senjata, sementara Hamas tidak merasakan manfaat gencatan senjata itu bagi tuntutan mereka: pengakhiran blokade.

Apa pun perhitungan dan pertimbangan politik di balik berbagai upaya diplomasi ini, maka yang menjadi korban dalam peperangan ini adalah masyarakat sipil (terutama kaum perempuan dan anak-anak), yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam konflik ini.

Dalam kaitan ini kita mendorong pemerintah RI juga terus memainkan peranannya dalam upaya diplomasi perdamaian ini yakni dengan menggalang solidaritas negara-negara anggota OKI maupun GNB untuk menekan Israel maupun negara-negara yang mendukungnya agar invasi militer ke Gaza diakhiri. Di atas itu semua, setiap perkembangan apa pun yang terjadi di Timur Tengah (kawasan yang tidak pernah berhenti bergolak) selalu punya dampak di dalam negeri, entah itu berbagai aksi unjuk rasa damai, sampai upaya-upaya untuk pergi ke lokasi konflik membantu salah satu pihak yang bertikai.

Upaya menggalang dialog antar-Palestina yang pernah dilakukan oleh Departemen Luar Negeri RI hendaknya dilanjutkan, karena di sini juga sumber persoalannya. Ada ucapan bijak dari mantan Menteri Luar Negeri RI (almarhum) Ali Alatas: "war can be imposed from outside, but peace only can be imposed from inside", yang bisa diartikan perang sangat mudah diciptakan oleh siapa saja dari luar, tetapi perdamaian harus dikerjakan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai itu. Bangsa Palestina tidak boleh terprovokasi untuk terus berperang dan pecah-pecah.

Mereka harus menyatukan aspirasi perjuangan untuk kemerdekaan bangsa mereka, antara lain dengan mulai menjalin kembali persatuan, membentuk sebuah pemerintahan bersama. Ini semua agar tidak mudah bagi pihak luar untuk terus memompakan semangat berperang dan berkonflik sesama mereka. (Sinar Harapan)

Jakarta, 12 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu